

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi di seluruh belahan dunia terutama terjadi di dunia berkembang seperti Negara Indonesia dan kemiskinan termasuk permasalahan yang sangat beragam dan rumit sepanjang sampai saat ini. Kesadaran tentang kemiskinan merupakan suatu cerminan atau gambaran dalam suatu negara yang dapat menggambarkan bahwa Negara tersebut merupakan Negara yang belum dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya yang tercantum dan didasarkan pada GBHN 1993 menegaskan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah membangun bangsa yang mandiri, sejahtera dan maju (Ardianto, 2016).

Kemiskinan masih merupakan masalah yang dialami seluruh belahan dunia terutama lebih sering terjadi pada negara berkembang. Kemiskinan terjadi tidak hanya berkaitan dengan orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak atau tidak dapat membiayai kebutuhan hidupnya akan tetapi juga berkaitan dengan adanya ketimpangan penghasilan antar masing-masing penduduk (Hudiyanto, 2014).

Masalah kemiskinan tidak hanya terjadi lebih pada ketimpangan dan pengangguran tetapi juga merupakan suatu masalah klasik yang besar dan mendasar bagi negara-negara berkembang di dunia seperti negara Indonesia.

Beberapa pakar di bidang ilmu ekonomi dan sosial telah mengembangkan dan membuat formulasi dengan menciptakan berbagai macam indikator dan parameter untuk menghitung jumlah penduduk dan mengukur tingkat kemiskinan suatu negara (Hudaya, 2009).

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh belum maksimalnya upaya pemerintah dalam menemukan dan menerapkan cara untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan masyarakat belum memahami betul bagaimana cara yang dapat masyarakat lakukan dalam upaya mengurangi kemiskinan. Salah satu penyebab kemiskinan yang paling nyata dan kerap sekali terjadi di Indonesia yaitu kegiatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Korupsi mengakibatkan dana yang dialokasikan oleh pemerintah yang semestinya dipergunakan untuk mengatasi kemiskinan akan berkurang banyak sekali bagian yang dapat langsung sampai dan dipergunakan oleh masyarakat sehingga dana yang dialokasikan pemerintah kepada masyarakat tidak dapat dipergunakan secara maksimal untuk menanggulangi atau mengurangi tingkat kemiskinan (Wiguna, 2013).

Dilihat dari sisi lain pendidikan ialah salah satu modal untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dalam skala besar bagi negara dan kesejahteraan dalam skala kecil bagi diri sendiri. Jika tingkat kemiskinan suatu negara meningkat, maka hal itu disebabkan karena tingkat pendidikan dalam negara tersebut rendah. Dengan kurangnya modal pendidikan yang dimiliki dan kemampuan diri yang mumpuni, maka masyarakat sebagai pribadi pelaku ekonomi hanya mampu berusaha di dalam suatu bidang pekerjaan saja untuk

membayai kehidupan mereka dan masyarakat tidak memiliki tingkat intelektual tinggi untuk mengembangkan usaha di bidang ekonomi lainnya.

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar sebagai negara berkembang. Di negara Indonesia, jumlah penduduk miskin tercatat masih sangat banyak dan sebagian besar memiliki tempat tinggal di pedesaan dengan akses yang sulit tidak hanya itu, di daerah perkotaan dalam Provinsi Jawa Tengah penduduk miskin yang tinggal disitu masih tersebar cukup banyak.

Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan Indonesia yang pembangunannya di wilayah ini terbilang relatif cepat selama ini jika dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Dibalik pembangunan yang cepat tersebut, tingkat kemiskinan di Pulau Jawa juga lebih tinggi dibandingkan pulau-pulau lainnya (Ardianto, 2016).

Berikut tabel data penduduk miskin provinsi yang ada di Pulau Jawa dengan perbandingan penduduk miskin nasional dari tahun 2015-2016.

Tabel 1.1
Kemiskinan Nasional dan Provinsi se Jawa Tahun 2015-2016

No.	Provinsi/Nasional	2015		2016	
		(ribu jiwa)	(%)	(ribu jiwa)	(%)
1.	DKI Jakarta	412.790	4,09	358.670	4,09
2.	banten	649.190	5,51	690.660	5,75
3.	Jawa Barat	4.238.960	9,18	4.485.660	9,57
4.	Jawa Timur	4.748.420	12,28	4.775.970	12,28
5.	Jawa Tengah	4.561.820	13,58	4.505.780	13,32
6.	D.I.Yogyakarta	532.580	14,55	485.560	13,16
Nasional		27.727.780	10,96	28.513.600	11,13

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) di setiap Provinsi di Pulau Jawa tahun 2016

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015 hingga 2016 jumlah penduduk miskin yang paling sedikit yaitu tahun 2015 sebesar 4,09% dari total penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta, dan pada tahun 2016 masih stagnan di tingkat presentase kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 4,09%.

Posisi kemiskinan yang ada di Pulau Jawa tidak terpengaruh oleh rendahnya tingkat persentase kemiskinan dan jumlah penduduk miskin. Posisi teratas atau yang paling sedikit angka kemiskinan yang ada yaitu Provinsi DKI Jakarta jika dibandingkan dengan provinsi yang ada di Pulau Jawa lainnya, bahkan angkanya jauh dari tingkat kemiskinan nasional artinya, Provinsi DKI Jakarta telah dikatakan berhasil dalam hal pembangunan dikarenakan angka kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta berhasil menyentuh angka di bawah 10%.

Angka kemiskinan Jawa Tengah masih jauh dari harapan. Berbeda dengan Provinsi DKI Jakarta, angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih berada di atas angka 10% masih terpaat jauh sekali dengan tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut bahwa kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2015 sebesar 13,58% dari jumlah penduduk miskin. Angka tersebut masih jauh dari angka nasional 2015 sebesar 10,98%. Masih sama halnya ditahun berikutnya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah terbilang masih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan nasional dan dibandingkan pula dengan tingkat kemiskinan di provinsi DKI Jakarta, hal tersebut dapat disebabkan karena tidak meratanya

pembangunan daerah yang mengakibatkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih berada di atas angka 10%. Pembangunan di suatu daerah dapat dikatakan berhasil apabila pemerintah daerah dapat menurunkan tingkat kemiskinan hingga berada dibawah 10%.

Oleh sebab itu, dalam hal ini pemerintah belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil dalam menangani masalah kemiskinan khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah diharapkan lebih memberikan perhatiannya terhadap upaya pengentasan kemiskinan khususnya di Provinsi Jawa Tengah mengingat tingkat kemiskinan yang masih tinggi di provinsi tersebut. Adapun upaya yang dapat dilakukan guna menurunkan tingkat kemiskinan yaitu mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang efektif dapat menurunkan tingkat kemiskinan khususnya di Provinsi Jawa Tengah meliputi Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut. Pemerintah telah membuat kebijakan mengeluarkan Undang-Undang dan beberapa program nasional yang di dalamnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan antara lain tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, kesehatan serta upah minimum. (Sumodiningrat, 1999)

Di bidang ketenagakerjaan, beberapa kebijakan telah dibuat guna mengentaskan masalah kemiskinan salah satunya adalah kebijakan upah minimum. Tujuan penerapan kebijakan upah minimum daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Kebijakan upah minimum lebih ditujukan pada pencapaian

kebutuhan hidup yang layak dengan memperhatikan tingkat produktivitas seseorang dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Oleh sebab itu, tujuan pemerintah menerapkan kebijakan upah minimum adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, dengan cara menghitung kebutuhan dasar masyarakat dan sebagai pelindung sosial dengan menghitung kebutuhan pendidikan dan transportasi.

Tabel 1.2
Rata-Rata Kebutuhan Hidup Layak dan Upah Minimum Provinsi
Jawa Tengah tahun 2012-2016 (Rupiah)

Tahun	KHL	UMK
2012	650.603	620.705
2013	726.350	701.300
2014	841.890	800.538
2015	940.375	914.275
2016	1.0777793	1.066.603

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Tingkat Upah Minimum dan kebutuhan hidup layak meningkat tiap tahunnya, dapat dilihat pada Tabel 1.2, pada tahun 2012 sebesar Rp. 650.603, mengalami peningkatan pada tahun 2013 yaitu menjadi sebesar Rp. 726.350. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi Rp.841.890 dan terus meningkat pada tahun 2015 tingkat upah minimum sebesar Rp. 914.275 dan meningkat menjadi Rp. 1.066.603 pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan kebijakan yang tepat untuk mengurangi jumlah pengangguran yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah telah menerapkan kebijakan dengan meningkatkan tingkat upah minimum setiap tahunnya, namun hal tersebut dirasa masih belum

mencukupi kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat. Sehingga angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih cukup tinggi. Maka dari itu, diperlukan kerjasama pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah untuk menyikapi penetapan upah minimum dengan tujuan mensejahterakan, serta pemerintah dapat menjaga perkembangan dan mengontrol peningkatan laju perekonomian dengan baik. Upah tenaga kerja yang didapat rendah dan dirasa belum bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup yang menyeluruh dikarenakan beberapa hal seperti masih rendahnya tingkat efisiensi masing-masing perusahaan, menyangkut pada masih rendahnya keahlian masing-masing pekerja, dan menyangkut pada sistem pengupahan yang tidak tepat. (Sumarlin, 2010)

Tidak hanya Upah Minimum Kabupaten/Kota, jumlah pengangguran yang berkurang juga dapat menurunkan angka kemiskinan di suatu negara atau wilayah. Pengangguran ialah seseorang atau sekelompok orang yang sedang mencari pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan. Dua hal ini, pengangguran dan kemiskinan merupakan dua masalah yang saling berkaitan satu sama lain. Apabila tingkat pengangguran bertambah, maka akan turut menambah angka kemiskinan karena pengangguran merupakan seseorang yang tidak memiliki pendapatan sehingga seseorang tersebut tidak mempunyai penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya. (Wiguna, 2013)

Tabel 1.3
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) Jawa Tengah Tahun 2012-2016

Tahun	TPT (%)	TPAK (%)
2012	6,21	70,60
2013	7,07	70,15
2014	5,61	71,26
2015	6,01	70,43
2016	5,68	69,68

Sumber : BPS Prov.Jawa Tengah Tahun 2016

Dilihat dari tabel 1.3 di atas dapat diketahui bahwa TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2012 angka TPT Jawa Tengah sebesar 6,21%. Setelah itu meningkat pada tahun 2013 yaitu menjadi 7,07%. Namun sedikit berbeda pada tahun 2014, tingkat pengangguran di tahun ini mengalami penurunan menjadi 5,61%. Pada tahun 2015 menjadi sebesar 6,01% dan pada tahun 2016 angkanya menurun menjadi 5,68%. Dengan menurunnya tingkat pengangguran mengindikasikan jumlah pengangguran berkurang dan laju perekonomian semakin baik.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menggambarkan persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, selama tiga tahun terakhir angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terus mengalami penurunan, hal itu diindikasikan dengan menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tersebut dimana orang yang aktif secara ekonomi semakin menurun tiap tahunnya. Berdasarkan table 1.3 angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Jawa Tengah pada tahun 2012 sebesar 70,60% namun terjadi penurunan 0,45% di tahun 2013 menjadi 70,15%. Pada tahun 2014 terjadi

peningkatan menjadi 71,26%, namun pada tahun 2015 menurun menjadi 70,43% dan terus menurun pada tahun 2016 hingga sebesar 69,68%, hal ini mengindikasikan semakin berkurangnya masyarakat yang tergolong dalam angkatan pekerja yang aktif secara ekonomi.

Ada beberapa hal yang merupakan indikator dari kemiskinan yaitu Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Pengangguran yang menjadi acuan dalam perkembangan pembangunan ekonomi yang menjadi tonggak dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, namun masih terdapat beberapa variabel lainnya yang juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan suatu wilayah atau negara salah satu contohnya yaitu variabel pendidikan. Pendidikan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang dalam menyerap ilmu dalam menerapkan teknologi modern dan mengembangkan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input bagi fungsi produksi agregat (Todaro, 2011). Pendidikan dapat mempengaruhi banyaknya pendapatan orang-orang yang berpendidikan dan juga menambah nilai produksi dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan berpengaruh pada pendapatan yang akan diterimanya nanti. Selain itu, pendidikan berpengaruh dengan seseorang dapat membaca, berpendapat, berkomunikasi dan seseorang akan lebih diperhitungkan oleh orang lain dan sebagainya. Oleh sebab itu, pendidikan sangat berperan penting dalam pembangunan perekonomian (Todaro, 2011).

Pengangguran dapat diatasi dengan tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan primer yang cukup penting, apabila tingkat

pendidikan seseorang tinggi, maka seseorang tersebut tentunya akan mempunyai ilmu dan skill yang lebih memadai untuk siap bekerja. Selain itu, berani untuk bersaing dengan yang lain karena dianggap mempunyai keahlian yang lebih baik sehingga angka pengangguran berkurang dan secara langsung dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Pendidikan wajib belajar 9 tahun masih sangat perlu diterapkan untuk menunjang pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun bagi golongan orang kurang mampu dalam ekonomi. Dapat dilihat, fenomena yang terjadi sekarang tidak seimbang antara jumlah penduduk yang mencari pekerjaan dengan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia sehingga menuntut seseorang untuk memiliki skill dan ilmu yang lebih banyak agar dapat bekerja.

Tabel 1.4
Data Pendidikan yang Diplot Rata-Rata Lama Sekolah di Jawa Tengah Tahun 2012-2016

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
2012	6,75
2013	6,78
2014	7,39
2015	6,93
2016	7,03

Sumber: BPS Prov.Jawa Tengah Tahun 2016

Berdasarkan tabel 1.4 diketahui bahwa indikator pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah mengalami perbedaan setiap tahunnya, dapat dikatakan Pemerintah Daerah Jawa Tengah sudah cukup berhasil dalam mewajibkan program pendidikan dasar wajib 9 tahun meskipun tampaknya masih terdapat banyak pertanyaan besar mengenai penyerapan peserta didik melalui program pemerintah.

Perlunya pemerintah daerah melakukan pengkajian secara khusus mengenai besarnya daya serap pendidikan dan meningkatkan kualitas sebagai bentuk dari upaya untuk menggambarkan seberapa besar jumlah penduduk buta huruf dan aksara di Provinsi Jawa Tengah. Secara garis besar, pemerintah menggalakkan program pendidikan dasar wajib 9 tahun guna mengentaskan permasalahan penduduk buta huruf dan aksara di Provinsi Jawa Tengah.

Pembangunan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Sementara itu, kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari segi fisik dan non fisik. Segi fisik disini yang dimaksudkan adalah kualitas fisik yang harus ditingkatkan, bisa melalui program kesehatan dan gizi. Sehingga diharapkan program tersebut berhasil dan dapat mempengaruhi angka harapan hidup manusia karena semakin sehat seseorang atau semakin baik gizi yang diterima seseorang maka akan semakin lama usia manusia sedangkan dari segi non fisik dapat dicerminkan melalui pendidikan yaitu sumber daya manusia yang ada perlu dikembangkan karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi peluang untuk seseorang memperoleh pekerjaan. Dalam hubungannya dengan tingkat kemiskinan, apabila semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang dan kesehatan badan individu maka produktivitas individu tersebut akan meningkat, apabila produktivitas meningkat, mereka akan giat bekerja, dan dengan bekerja itu lah cara untuk memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena dapat memenuhi

kebutuhan ini lah, mereka dapat terhindar dari lingkaran kemiskinan. (R. Astuti, 2015)

Berdasarkan latar belakang yang dibahas diatas, penelitian ini berusaha mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Variabel-variabel dalam penelitian ini meliputi upah minimum kabupaten/kota, tingkat pendidikan, pengangguran dan kesehatan (angka harapan hidup), yang sekiranya dapat membantu menurunkan dan memecahkan masalah kemiskinan. Oleh karena itu penulis mengambil judul “DETERMINAN KEMISKINAN TAHUN 2012-2016 (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun 2012 sampai tahun 2016?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun 2012 sampai tahun 2016?
3. Bagaimana pengaruh Pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun 2012 sampai tahun 2016?
4. Bagaimana pengaruh Kesehatan (Angka Harapan Hidup) terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun 2012 sampai tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun 2012 sampai tahun 2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun 2012 sampai tahun 2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun 2012 sampai tahun 2016.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kesehatan (Angka Harapan Hidup) terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun 2012 sampai tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan, kiranya dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Sebagai gambaran bagi pemerintah provinsi Jawa Tengah tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kemiskinan dalam rangka merancang kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan ekonomi daerah maupun lingkup nasional.
2. Sebagai tambahan pengetahuan mengenai besarnya pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan dan Kesehatan (Angka Harapan Hidup) terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.